

**PROPOSAL KKN - PKM**  
**MEWUJUDKAN *ONE STOP SERVICE SYSTEM* MELALUI PROGRAM**  
**PEMBINAAN DESA SANTRI (SADAR DAN TANGGAP INFORMASI)**  
**DI DESA RANDUTATAH KECAMATAN PAITON**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**



KETUA : Fuadz Hasyim, M.Kom

NIDN : 0710038902

ANGGOTA

- |  |  |
|--|--|
| 1. NAMA : Rerin Wulandari<br>NIM : 17010056        | 2. NAMA : Hannik Nur Cahyani<br>NIM : 17010028 |
| 3. NAMA : Dwi Ayu Pradina<br>NIM : 1630500104      | 4. NAMA : Dewi Maimunah<br>NIM : 1621100065    |
| 5. NAMA : Nur Halimatul Hikmah<br>NIM : 1621100124 | 6. NAMA : Qurrotul Ainiyah<br>NIM : 1630500121 |
| 7. NAMA : Nur Fatmasari<br>NIM : 1620802011        | 8. NAMA : Nisfi Nur Laili<br>NIM : 17010046    |
| 9. NAMA : Nofiana<br>NIM : 17010047                | 10. NAMA : Siska Yuli Anita<br>NIM : 17010065  |
| 11. NAMA : Nur Khalilah<br>NIM : 161010080         | 12. NAMA : Nur Halisah<br>NIM : 1620802006     |

LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M)

**UNIVERSITAS NURUL JADID**

TAHUN 2019

## HALAMAN PENGESAHAN

### LAPORAN KKN-PKM

Judul KKN-PKM : Mewujudkan *One Stop Service System* Melalui Program Pembinaan Desa Santri (Sadar Dan Tanggap Informasi) di Desa Randutatah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

1. Nama Ketua : Fuadz Hasyim, M.Kom
  - a. NIDN : 0710038902
  - b. Jabatan/Golongan : -
  - c. Program Studi : Sistem Informasi
  - d. Nomor HP : +6282312344001

2. Anggota

No	Nama Anggota	Prodi	Fakultas	Tugas/ Bidang Ahli
1	Hannik nur Cahyani	IF	Teknik	Penggalian data administrasi desa (1)
2	Rerin Wulandari	IF	Teknik	Penggalian data administrasi desa (2)
3	Nur Halimatul Hikmah	PS	Agama Islam	Penggalian data potensi desa (1)
4	Dewi Maimunah	PS	Agama Islam	Penggalian data potensi desa (2)
5	Nur Fatmasari	ES	Agama Islam	Penggalian data perekonomian masyarakat (1)
6	Nur Halisah	ES	Agama Islam	Penggalian data perekonomian masyarakat (2)
7	Nur Khalilah	IQT	Agama Islam	Asistensi dakwah program pembinaan desa SANTRI kepada aparaturnya
8	Qurrotul Ainiyah	MPI	Agama Islam	Asistensi dakwah program pembinaan desa SANTRI

				kepada warga (1)
9	Dwi Ayu Pradina	MPI	Agama Islam	Asistensi dakwah program pembinaan desa SANTRI kepada warga (2)
10	Nisfi Nur Laili	IF	Teknik	Merancang <i>flowchart one stop service system(OS3)</i> pada sistem pelayanan administrasi desa
11	Siska Yuli Anita	IF	Teknik	Membuat rancangan blue print sistem administrasi desa berbasis OS3
12	Nofiana	IF	Teknik	Membuat rancangan blue print sistem administrasi desa berbasis OS3

### 3. Lokasi Kegiatan

- a. Desa/Wilayah/Pesantren : Randutatah
- b. Kecamatan : Paiton
- c. Kabupaten : Probolinggo
- d. Provinsi : Jawa Timur
- e. Jarak PT ke Lokasi (km) : 2 km

#### Luaran Yang dihasilkan

(artikel/proceeding/HKI/dll) : Artikel jurnal ISSN, berita, *blue print*

Jangka Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan

Biaya Total : Rp 5.000.000,-

Subsidi Unuja : RP 5.000.000,-

Iuran tambahan/Sumbangan : -

Disahkan pada .....

Di .....

Mengetahui,

Kepala LP3M,

(Ahmad Fawaid MA,. MA,.)

NIDN. 2123098702

Ketua Tim,

(Fuadz Hasyim M.Kom)

NIDN. 0710038902

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Isu Aktual
- B. Alasan Memilih Program
- C. Riset Awal dan Basis Teori

BAB II STRATEGI AKSI DAN TARGET PROGRAM ATAU SISTEM PELAKSANAAN PROGRAM

- A. Strategi Aksi
- B. Target Program

BAB III KELAYAKAN PROGRAM

- A. Keterlibatan Stakeholder
- B. Resource yang Dimiliki

BAB IV ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN

- A. Anggaran Biaya
- B. Jadwal Pelaksanaan

DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAK

Desa dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal terkait semua urusan masyarakat. Keterlambatan penerbitan dokumen-dokumen penting masyarakat, misalkan lambatnya mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta kelahiran, itu merupakan dampak dari lambatnya pelayanan administrasi desa.

Lambatnya pelayanan administrasi desa tersebut di sebabkan oleh semua kegiatan dalam mengolah administrasi masih menggunakan cara manual, yaitu ditulis dalam buku administrasi. Sehingga banyak data yang hilang serta kerangkapan data. Walaupun sebagian sudah menggunakan komputer tapi masih belum bisa dilakukan secara otomatis.

Melalui program pembinaan desa SANTRI (Sadar dan Tanggap Informasi) dengan mewujudkan one stop service system (OS3) pada sistem pelayanan administrasi desa, masalah tersebut diatas akan dianalisis dan diurai melalui pembinaan perangkat desa dan masyarakat terkait administrasi desa. Pembinaan ini fokus pada bidang administrasi yang berbasis sistem informasi, bukan hanya sekedar penataan manajemen administrasi saja. Sehingga nantinya administrasi desa bisa terintegrasi serta cepat dalam proses pelayanannya.

Program tersebut dijalankan melalui beberapa langkah penting, seperti pembuatan Pengumpulan Kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Membuat Rancangan Sistem, Implementasi, target dari pendampingan ini adalah perangkat Desa Randutatah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan masyarakat Desa Randutatah.

**Katakunci:** *Desa SANTRI, One Stop Service System, administrasi desa, Randutatah, Probolinggo.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Isu Aktual**

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kedudukan kepala desa sebagai pemimpin dan dibantu oleh perangkat desa pada saat melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya.

Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang dalam menjalankan tugasnya terdapat pembatasan. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masing-masing desa. Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi sebagai pengayom, pembina, pelayan, dan penggerak partisipasi masyarakat. Masyarakat desa baik secara kelompok maupun individu memerlukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, seperti pelayanan dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, warisan, kelahiran, perijinan dsb. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan pada asas; kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 24). Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari pemerintah, meskipun keinginan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan. Pelayanan yang diberikan secara umum masih berbelit-belit dengan berbagai alasan, lambannya kinerja aparaturnya dalam mengurus keperluan administrasi, kemudian melelahkan sehingga cenderung tidak efektif dan efisien.

## **B. Alasan Memilih Program**

Hasil penelitian (Adventus, 2014), tentang pelayanan administrasi kependudukan Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak, disimpulkan berjalan kurang tertib dan belum optimal, masih ada perangkat desa yang tidak mengantor sesuai dengan jam kerja sehingga memperlambat terlaksananya proses administrasi yang baik, serta kurangnya tanggungjawab kerja.

Hasil penelitian (Ningsih, 2013), mengenai pelayanan publik di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sangau ditemukan adanya pelayanan publik yang diberikan masih ada kendala berupa kecepatan waktu, sikap terlambat dalam pelayanan administrasi serta sering membolusnya oknum aparatur pada saat jam-jam kerja, masih banyaknya masyarakat desa yang mengeluh mengenai kinerja dalam pelayanan yang diberikan di kantor desa. Hasil analisis data menunjukkan bahwa aspirasi yang ditampung kurang cepat ditanggapi, pelayanan yang diberikan aparatur desa masih dirasakan tidak sesuai dengan prinsip administrasi yang benar, serta masih kurang konsisten dan kurang merespon apa yang menjadi masalah masyarakat, kesiapan aparat masih kurang dalam pengadaan dokumen.

Hasil penelitian (Karim, 2015) mengenai *E-Government in Service Delivery and Citizen's Satisfaction: A Case Study on Public Sectors in Bangladesh* menjelaskan bahwa dalam bentuk administrasi tradisional, pelayanan dikelilingi dengan prosedur yang panjang berbasis kertas yang membuat warga tidak puas dengan layanan karena beberapa masalah seperti keterlambatan dalam pelayanan, korupsi dan lokasi kantor pusat, dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga, pemerintah Bangladesh telah mengambil inisiatif untuk membuat layanan yang tersedia melalui online. Pemerintah telah mendirikan portal web nasional, menggabungkan dan membuat situs web resmi pemerintah. Warga sekarang dapat mengajukan aplikasi mereka melalui online untuk mendapatkan pelayanan publik yang diperlukan. Pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pembayaran tagihan, pembayaran pajak penghasilan, lisensi perdagangan, catatan tanah, masalah pertanian dan hukum.

Hasil penelitian (Huang, 2015), tentang *Mixed Supply Model of Public Service Provision in Village to Residence Community: An Empirical Case Study in Jinan* menjelaskan bahwa China sedang mengalami transisi cepat dari urbanisasi. Model pasokan campuran dari penyediaan pelayanan publik, atas dasar studi empiris dari dua kasus di kota Jinan, dengan menggambarkan transformasi urbanisasi dan bagaimana pelayanan publik di masyarakat yang disampaikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kendala dalam hal pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti kinerja aparat yang masih rendah dan kurang bertanggung jawab, pelayanan yang masih tradisional sehingga mengakibatkan masyarakat mengeluh mengenai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa, tetapi masih ada juga pemerintah yang memperhatikan kualitas pelayanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menerapkan e-governance atau elektronika governance yaitu pelayanan publik ke masyarakat dengan berbasiskan teknologi untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Desa Randutatah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo adalah suatu lembaga pemerintah yang berupaya melakukan pelaksanaan tugas pemerintah desa secara efektif dan efisien demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digunakan adalah sesuai dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Hasil wawancara dengan perangkat desa setempat bahwa, pemerintah desa Randutatah dalam melakukan pelayanan administrasi desa masih menggunakan sistem pelayanan konvensional yang dipadukan dengan sistem penyimpanan data ke dalam media komputer berbasis aplikasi excel sederhana. Pemberkasan formulir masih disimpan secara manual ke dalam lemari berkas. Kendala yang terjadi adalah sulitnya mendapatkan data kebutuhan terkait histori pelayanan administrasi desa yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah desa. Disamping itu perangkat desa masih kesulitan dalam melakukan penyusunan laporan hasil perekaman pelayanan administrasi desa yang diakibatkan oleh pengelolaan sistem

pemberkasan dokumen yang tidak teratur dan tidak tersusun dengan rapi. Sering terjadi ketidakkonsistenan data yang diakibatkan oleh sistem pelayanan administrasi yang tidak terintegrasi antara jenis pelayanan satu dengan yang lain.

Di sisi lain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administratif dalam pengurusan kegiatan tertentu juga menjadi salah satu penyebab kurangnya data administrasi desa. Misalnya dalam pembuatan KTP. Padahal persyaratan tersebut sudah terinformasikan di Ketua RT masing-masing atau bahkan terpasang di Balai Desa. Terkadang juga masyarakat enggan untuk mengurus sendiri karena birokrasi yang panjang dan bertele-tele, sehingga memakan waktu yang lama.

### **C. Riset Awal dan Basis Teori**

Administrasi dalam bahasa latin adalah Ad = intensif dan ministrare = melayani, membantu, memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan administrasi dalam bahasa belanda administratie yang merupakan pengertian administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan dan sebagainya).

Dalam arti luas, berasal dari bahasa Inggris *administration* yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (Siagian, 2008). Jadi administrasi adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dan menurut S.P Siagian adapun indikator-indikator dalam administrasi yaitu:

1. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih
2. Adanya tujuan
3. Adanya kerjasama

Menurut The Lian Gie dalam bukunya administrasi perkantoran modern (Gie, 2009), administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung delapan unsur yaitu:

1. Pengorganisasian, merupakan wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.

2. Manajemen, merupakan proses penggerakan orang-orang dan pengerahan segenap fasilitas didalam usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Komunikasi, yaitu proses penyampaian warta dari seorang kepada pihak lain dalam usaha kerjasama manusia.
4. Kepegawaian, merupakan suatu proses yang berhubungan dengan masalah penggunaan tenaga kerja di dalam suatu usaha kerja sama.
5. Keuangan, merupakan unsur administrasi yang menyangkut tentang masalah pembiayaan dalam suatu kerjasama, yaitu yang berkenaan dengan penataan, pengelolaan yang meliputi biaya, cara mengelolah serta mempertanggung jawabkannya.
6. Perbekalan, merupakan aktifitas yang menyangkut tentang peralatan yang di butuhkan dalam suatu usaha kerjasama yang meliputi proses pengadaan,penyimpanan, sampai kepada penyingkiran barang barang yang sudah di pergunakan lagi.
7. Tata usaha, kegiatan pelayanan terhadap penyelenggaraan usaha kerjasama, yang meliputi kegiatan pencatatan, penyimpanan, bahan keterangan.
8. Hubungan masyarakat, merupakan kegiatan usaha kerjasama dengan menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat atau dengan pihak lain agar mendapatkan dukungan secara sadar dan sukarela.

Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatakan bahwa, administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau pejabat pemerintahan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yaitu keseluruhan proses kegiatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa.

Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Bab V Pasal (2) dibagi menjadi beberapa hal antara lain :

1. Administrasi Umum adalah pecatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintah desa pada buku administrasi umum, terdiri dari:
  - a. Buku data Peraturan Desa
  - b. Buku data keputusan kepala Desa

- c. Buku data tanah milik Desa
  - d. Buku data aparat Pemerintah Desa
  - e. Buku tanah Desa
2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk, terdiri dari:
- a. Buku data induk penduduk desa
  - b. Buku data mutasi penduduk
  - c. Buku data rekapitulasi jumlah penduduk
  - d. Buku data penduduk sementara
3. Administrasi Keuangan adalah administrasi kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan, terdiri dari:
- a. Buku anggaran penerimaan
  - b. Buku anggaran pengeluaran pembangunan
  - c. Buku kas umum
  - d. Buku kas pembantu pengeluaran pembangunan
4. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, dan telah dilaksanakan pada buku administrasi pembangunan, terdiri dari:
- a. Buku rencana pembangunan
  - b. Buku kegiatan pembangunan
  - c. Buku inventaris proyek
  - d. Buku kader-kader pembangunan/ pemberdayaan masyarakat
5. Buku data anggota Administrasi Badan Permusyawaratan Desa adalah informasi mengenai BPD, terdiri dari:
- a. Buku program BPD
  - b. Buku data keputusan BPD
  - c. Buku data kegiatan BPD
  - d. Buku agenda BPD
  - e. Buku ekspedisi BPD

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa dari sudut pandang social budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relative homogeny dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sector agraris, mempunyai ikatan social, adat dan tradisi yang kua, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005).

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berada di Kabupaten/Kota, dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa di bentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan hak asal usul desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: jumlah penduduk, Luas Wilayah, Bagian Wilayah Kerja, Perangkat Desa dan sarana dan prasarana pemerintahan.

Pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan artinya tanpa membangun Desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari keberhasilan kita membangun desa.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa inti masalah yang dihadapi dalam pelayanan administrasi pemerintahan Desa Randutatah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo adalah: **Belum adanya sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa terpadu yang membantu mempermudah pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dengan baik dan sistematis.**

## BAB II

### STRATEGI AKSI DAN TARGET PROGRAM ATAU SISTEM PELAKSANAAN PROGRAM

#### A. Strategi Aksi

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan sebagaimana yang dijelaskan di depan, dibutuhkan beberapa strategi khusus yang tertuang dalam gambar 2.1.



Gambar 2.1. Rancang Bangun Strategi Aksi

*Strategi pertama*, melakukan kunjungan kepada Kepala desa, perangkat desa dan masyarakat Desa Patemon Kulon. Langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain:

1. Observasi:

Mengamati alur pelayanan administrasi di desa Patemon Kulon, yang sedang berjalan selama ini.

2. Wawancara:

Melakukan wawancara kepada orang yang terlibat dalam administrasi desa dalam hal ini adalah perangkat desa dan masyarakat, untuk mendapatkan informasi yang benar persoalan masalah dan sistem administrasi desa.

*Strategi kedua*, menganalisis data yang sudah didapatkan dari strategi pertama, langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisis Data:

Mempelajari hasil data yang sudah didapatkan kemudian mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada.

2. Menyimpulkan Kebutuhan Data:

Menyimpulkan hasil analisa kebutuhan data untuk dijadikan acuan dalam solusi masalah administrasi desa.

*Strategi ketiga*, membuat rancangan sistem dari dengan mengacu pada hasil dari strategi kedua, yaitu membuat alur yang di implementasikan dalam sebuah bentuk flowchart diagram agar mudah dipahami.

## B. Target Program

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
<b>Luaran Wajib</b>		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal berISSN	Terbit
2	Publikasi pada media massa cetak/online/repository PT	Terbit
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya pendukung)	Tidak ada
4	Peningkatan penerapan Iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Penerapan
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Tidak ada
<b>Luaran Tambahan</b>		
1	Publikasi di jurnal internasional	Tidak ada
2	Jasa: rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Metode
3	Inovasi baru TTG	Tidak ada
4	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	Tidak ada
5	Buku ber ISBN	Tidak ada

## **BAB III**

### **KELAYAKAN PROGRAM**

#### **A. Keterlibatan Stakeholder**

1. Universitas Nurul Jadid. Universitas Nurul Jadid merupakan lembaga perguruan tinggi yang berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid, sebuah lembaga pesantren terbesar di Probolinggo yang berbasis di Kecamatan Paiton. Sejak dulu, UNUJA sudah terlibat dalam berbagai kegiatan lingkungan. Dalam konteks program ini, UNUJA, utamanya melalui Fatarta (Fakultas Tarbiyah Pecinta Lingkungan), dapat menyediakan basis teoretis dan aplikatif dalam memberdayakan masyarakat Paiton melalui program-program ekologiannya. Karena itulah, pihak UNUJA melalui Fatarta-nya akan diajak sebagai mitra dalam bentuk (1) penanaman pohon; (2) proyek kegiatan course; (3) sosialisasi program; dan (4) perencanaan aksi lapangan.
2. Pemerintah Desa Randutatah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Tentu saja, keterlibatan pemerintah desa merupakan yang terpenting dalam program ini. Posisinya bukan hanya strategis dalam mendukung program ini, melainkan juga kontributif dalam menentukan keberlanjutan dalam mengimplementasikan program ini sehingga menjadi produk sistem yang berkualitas dan siap terap. Pemerintah desa memiliki sumber daya berupa program, sarana, dan dana. Dalam konteks program ini, pemerintah desa diharapkan bisa diajak bekerja sama untuk menggalang partisipasi para warga agar memahami pentingnya penataan administrasi yang baik. Bagaimanapun, pemerintah desa juga punya kepentingan untuk tetap terlibat dalam hubungan yang baik dengan warganya.
3. Masyarakat. Masyarakat merupakan aktor terpenting kedua setelah pemerintah desa. Masyarakat sekitar adalah pihak yang beriteraksi baik secara langsung dengan sistem maupun tidak langsung melalui perangkat desa terkait pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi desa. Mereka akan diberikan informasi dan pembinaan, diajak turut serta dalam kegiatan *course* dalam jangka waktu 4 bulan, dan dilatih menjalan

aksi-aksi yang nyata demi terciptanya sistem pelayanan administrasi desa terpadu satu pintu (One stop service system).

4. Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Lembaga eksekutif di tingkat kabupaten ini memiliki kepentingan utama yaitu melindungi kepentingan umum dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Instansi ini memiliki sistem, struktur, aparat dan dana. Sumber daya yang diharapkan dari instansi negara ini adalah berupa *political will*, *policy making*, aparat pengawas sistem tata kelola wilayah, bantuan dana. Bentuk keterlibatan dalam program ini adalah diberi informasi, diajak diskusi dalam penyusunan rencana program aksi, didorong menjalankan *policy brief*, serta diajak dalam peningkatan kuantitas dan kualitas aparat yang berperan sebagai pengguna sistem.

Peta lokasi wilayah stakeholder mitra seperti terlihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1. Peta Jarak PT dengan lokasi mitra

## B. Resource yang Dimiliki

Komunikasi merupakan skil yang paling penting untuk dimiliki oleh semua orang dari berbagai bidang. Dengan skil komunikasi yang baik dapat menjalin hubungan baik pula dengan orang dari berbagai kalangan. Terbangunnya komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan masyarakat desa merupakan bentuk langkah untuk menjalankan program yang sedang dirancang oleh peserta KKN-PKM yang ada di Desa Randuatah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Bentuk kegiatan ini merupakan program pembinaan desa SANTRI (sadar dan tanggap informasi) untuk mewujudkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (one stop service system) pada pelayanan administrasi desa.

Adapun program KKN-PKM ini meliputi:

5. Penataan administrasi desa
6. Pembinaan masyarakat desa terkait pentingnya pengurusan administrasi kependudukan
7. Publikasi hasil melalui media Online
8. Membuat *blueprint* sistem pelayanan administrasi desa berbasis OS3.

Komposisi Tim Fasilitator Program ini terdiri atas seorang ketua tim dan dibantu oleh 12 (dua belas) orang anggota yang mempunyai tugas garapan sendiri-sendiri, yaitu: penggalan data administrasi kependudukan, penggalan data potensi desa, penggalan data perekonomian masyarakat, membuat rancangan *flowchart* sistem pelayanan administrasi desa, dan membuat rancangan *blueprint* sistem pelayanan administrasi desa berbasis OS3. Adapun susunan selengkapnya dari Tim Fasilitator Program KKN-PKMini adalah sebagai berikut:

Ketua : Fuadz Hasyim, M.Kom.

- Latar belakang di bidang pendidikan dan metodologi riset yang sesuai dengan KKN-PKM ini dari sudut pandang teknologi meliputi publikasi dan penerapan dalam bidang teknologi.

- Mendapatkan beberapa pendanaan dari RISTEKDIKTI dalam Hibah Penelitian Dosen tingkat nasional.
- *Software Engineer and system analyst.*
- Berperan sebagai inisiator program dalam KKN-PKM ini.

Anggota :

1. Hannik Nur Cahyani
  - Mahasiswa Fakultas Teknik
  - Paskibraka 2015
  - Berperan sebagai tim penggali data administrasi desa (1)
2. Rerine Wulandari
  - Mahasiswa Fakultas Teknik
  - Ketua Osis MA MIFTAHUL ULUM 2015
  - Berperan sebagai tim penggalidata administrasi desa (2)
3. Dwi Ayu Pradina
  - Mahasiswa Fakultas Agama Islam
  - Osis Az-zainiyah 2
  - Berperan sebagai tim asistensi dakwah program pembinaan desa SANTRI kepada warga (2)
4. Dewi Maimunah
  - Mahasiswa Fakultas Agama Islam
  - HMJ Perbankan Syariah
  - Berperan sebagai tim penggali data potensi desa (2)
5. Nur Fatmasari
  - Mahasiswa Fakultas Agama Islam
  - PMR Saka Bhakti Husada Puskesmas Jambesari, Paskibraka 2015
  - Berperan sebagai tim Penggalian data perekonomian masyarakat (1)
6. Qurratul Ainiyah
  - Mahasiswa Fakultas Agama Islam
  - OSIS MTS Nurul Huda 2011, DPM Fakultas Agama Islam 2019

- Berperan sebagai timasistensi dakwah program pembinaan desa SANTRI kepada warga (1)

7. Nur Halimatul Hikmah

- Mahasiswa Fakultas Agama Islam
- DPM Universitas Nurul Jadid
- Berperan sebagai tim Penggalan data potensi desa (1)

8. Nisfi Nur Laili

- Mahasiswa Fakultas Teknik
- Guru MI Islahiyah
- Berperan sebagai tim perancang *flowchart one stop service system* (OS3) pada sistem pelayanan administrasi desa

9. Nofiana

- Mahasiswa Fakultas Teknik
- PMII Universitas Nurul Jadid
- Berperan sebagai tim Membuat rancangan blue print sistem administrasi desa berbasis OS3

10. Nur Khalilah

- Mahasiswa Fakultas Agama Islam
- HMJ IQT
- Berperan sebagai tim asistensi dakwah program pembinaan desa SANTRI kepada aparatur desa

11. Siska Yuli Anita

- Mahasiswa Fakultas Teknik
- PMII Universitas Nurul Jadid
- Berperan sebagai tim pembuat rancangan *blue print* sistem administrasi desa berbasis OS3

12. Nur Halisah

- Mahasiswa agama Islam
- Osis Man 1 Paiton
- Berperan sebagai tim penggali data perekonomian masyarakat (2)

**BAB IV**  
**ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN**

**A. Anggaran Biaya**

Program ini membutuhkan dana sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Sumber dana diharapkan berasal dari dana Tunjangan Universitas Nurul Jadid. Adapun rincian rencana anggaran adalah sebagaimana berikut.

Judul PkM : *Mewujudkan One Stop Service System Melalui Program Pembinaan Desa SANTRI (Sadar dan Tanggap Informasi) di Desa Randutatah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo*

Ketua Tim : Fuadz Hasyim, M.Kom.

Pangkat/Gol. : -

NIDN : 0710038902

<b>A</b>	<b>SHORT COURSE</b>	<b>BANYAKNYA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Biaya Short Course PkM	2	Orang	750.000	1.500.000
<b>Jumlah</b>					<b>1.500.000</b>
<b>B</b>	<b>ADMINISTRASI</b>	<b>BANYAKNYA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Laporan proposal	4	Buah	50.000	200.000
2	Laporan Akhir	4	Buah	100.000	400.000
3	ATK	4	Paket	300.000	1.200.000
<b>Jumlah</b>					<b>1.800.000</b>
<b>C</b>	<b>NEGOSIASI DENGAN PEMERINTAH DESA RANDUTATAH</b>	<b>BANYAKNYA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Proposal kerja sama	5	Buah	30.000	150.000
2	Brosur sosialisasi	200	Lembar	1.000	200.000
3	Surat-menyurat	20	Lembar	5.000	100.000
<b>Jumlah</b>					<b>450.000</b>
<b>D</b>	<b>COMMUNITY PRACTICE</b>	<b>BANYAKNYA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Modul pelatihan pendampingan pelayanan administrasi desa	50	Eksemplar	25.000	1.250.000
<b>Jumlah</b>					<b>1.250.000</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>5.000.000</b>
Terbilang: Lima Juta Rupiah					





## DAFTAR PUSTAKA

1. Adventus. (2014). *Kinerja Organisasi Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak*. Pontianak.
2. Gie, T. L. (2009). *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Modern Liberty.
3. Huang. (2015). *Mixed Supply Model of Public Service Provision in Village to Residence Community: An Empirical Case Study in Jinan*.
4. Karim, M. R. (2015). *E-Government in Service Delivery and Citizen's Satisfaction: A Case Study on Public Sectors in Bangladesh*. Dhaka: Bangladesh Public Administration Training Centre.
5. Ningsih, F. (2013). *Kinerja Aparat Pemerintah Dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau*.
6. Siagian, S. P. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT.Gunung Agung.